

**PERAN HAKIM DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA TERNATE MALUKU  
UTARA)**



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**Oleh:**

**Suwandi Soleman  
NIM: 1620310050**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Program Studi Magister Hukum Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam**

**YOGYAKARTA  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suwandi Soleman S. Ud

Nim : 1620310050

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 30 Oktober 2018

kan,  
  
Suwandi Soleman  
1620310050

METERAI  
TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
6AC22AFF235483607

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suwandi Soleman S.Ud  
Nim : 1620310050  
Program Studi : Magister Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Oktober 2018

  
  
Suwandi Soleman  
1620310050



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 3034 /2018

Tugas Akhir dengan judul : PERAN HAKIM DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN ( STUDI KASUS  
DI PENGADILAN AGAMA TERNATE MALUKU UTARA )

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUWANDI SOLEMAN, S Ud  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310050  
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Oktober 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 25 Oktober 2018  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koneksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PERAN HAKIM DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN (STUDI  
KASUS DI PENGADILAN AGAMA TERNATE MALUKU UTARA)**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Suwandi Soleman
Nim	: 1620310050
Prodi	: Magister Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alikum wr. Wb*

Yogyakarta, 19 Oktober 2018

Pembimbing



Prof. Dr. H. Makhrus, SH M Hum  
NIP 19680202 199303 1 003

**MOTTO**

**“KECERDASAN BUKANLAH TOLOK UKUR KESUKSESAN,  
AKAN TETAPI DENGAN MENJADI CERDAS KITA DAPAT  
MENGGAIPAI KESUKSESAN”**

**“UNTUK MENDAPATKAN KESUKSESAN,  
MAKA KEBERANIAN HARUS LEBIH BESAR DARIPADA  
KETAKUTANMU”**

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya ini kepada:

Prodi Hukum Islam Program Magister

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Spesial untuk kedua orangtuaku tercinta Bapak Soleman

Ibrahim dan Ibu Hajar Ishak.

Terima kasih telah menjadi sumber semangat, motivasi dan  
inspirasi selama ini.

Terima kasih karena tidak pernah lelah memberikan cinta, kasih  
sayang, tenaga, pikiran, waktu, biaya dan do'anya.

Teruntuk kakakku dan Ponakanku tersayang Yuliyarti dan  
Roswita. Maysah Annairah dan Abdul Qadir Djailani

Terima kasih untuk semangat, dukungan dan motivasinya.

---

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

## ABSTRAK

Penelitian Tesis ini berjudul “*Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ternate)*.” Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah berkenaan dengan peran hakim dan proses mediasi di Pengadilan Agama Ternate. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Ternate. Penelitian ini juga bertujuan untuk bagaimana mengetahui peran hakim dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ternate, bagaimana penerapan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Ternate, bagaimana efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Ternate dan bagaimana upaya Hakim mediator dalam mengefektifkan mediasi sebagai penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ternate.

Penelitian ini memakai teori Gren Theory, middle theory, Operational theory, dan teori tahkim. Masing-masing menjelaskan tentang mediasi, atau proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dan juga Teori ini menjelaskan tentang kelembagaan hukum dan bagian dari struktur hukum seperti di Mahkamah Agung dan badan-badan dibawahnya seperti Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Ternate. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan, dengan langsung ke Pengadilan Agama Ternate sebagai obyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada responden yang telah ditunjuk pihak pengadilan, penyusun juga mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema, yang diangkat dengan menganalisisnya dengan pendekatan normatif yuridis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Agama Ternate sudah berjalan sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016. Mediasi dan konsep perdamaian dalam hukum Islam. Dalam hal ini, Hakim di Pengadilan Agama Ternate selalu memberikan solusi dan pengarahan yang baik kepada para pihak yang berperkara agar bisa rukun dalam membina rumah tangga. Namun dari semua upaya Hakim untuk mencapai hasil yang baik dari proses mediasi itu belum maksimal karena dari banyaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Ternate, hanya terdapat beberapa kasus Perceraian saja yang berhasil dimediasi yaitu Tahun 2016 ada 2 yang berhasil dan 169 tidak berhasil dan Tahun 2017 ada 4 berhasil dan 147 tidak berhasil. Hal ini juga tidak terlepas dari kesadaran masing-masing pihak akan pentingnya mediasi itu sendiri terhadap rumah tangganya. Oleh karena itu penulis merekomendasikan bahwa sepatutnya Mahkamah Agung harus lebih meningkatkan adanya pelatihan dan pendidikan terhadap Hakim Pengadilan Agama agar lebih maksimal dalam mengemban tugas sebagai seorang mediator dan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan, agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin menikah.

Kata Kunci : Peran, Hakim, Mediasi Perceraian



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓ al	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدّة	ditulis	'iddah

### III. Ta' Marbutah di akhir Kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

### IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

## V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadits*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh*.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Toko Hidayah*, *Mizan*.

## **KATA PENGANTAR**

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على  
أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang Maha Berkehendak, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan Strata dua yaitu Tesis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW. yang telah menolong manusia dari masa yang penuh dengan kegelapan ilmu menuju masa yang penuh dengan cahaya ilmu dan iman. Sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syari'at Islam yang telah disampaikan.

Proses pembuatan tesis ini bukan tidak ada hambatan, melainkan banyaknya lika-liku yang penulis dapatkan. Sehingga menjadikan penulis harus bekerja keras tanpa menyerah dan putus asa demi memperoleh semua data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Fathorrahman, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr.Makhrus SH. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah rela meluangkan waktu dan kesabarannya untuk memberikan arahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si dan Ibu Sri Wahyuni M.Ag. M.Hum selaku dosen penguji tesis, yang telah bersedia meluangkan waktu menguji tesis ini, memberi kritik, saran, dan masukan, sehingga tesis ini layak untuk diterbitkan.
6. Karyawan TU Prodi yang dengan sabar melayani penulis mengurus administrasi akademik.
7. Kedua orang tuaku, Bapak Soleman Ibrahim dan Ibu Hajar Ishak, dua insan yang menjadi jalan hadirku di muka bumi ini. Berkat doa dan ketulusannya yang telah membekaliku untuk mengarungi samudera kehidupan ini dengan penuh semangat dan keyakinan.
8. Kakakku tersayang Yuliyarti dan Roswita, yang telah banyak berkorban dan mengalah demi kesuksesanku. Terima kasih untuk semua motivasi dan do'anya.

9. Ponakanku tersayang Maysah Annairah dan Abdul Qadir Djailani yang telah memberi warna dalam kehidupanku. Semoga tercapai segala mimpi dan cita-citamu.
10. Seluruh keluarga yang berada di Ternate (Tubo Tercinta), yang selalu memberi motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam belajar.
11. Para tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat yang telah bersedia menjadi responden untuk melengkapi data dalam penelitian tesis ini.
12. Teman-teman seperjuangan Kelas Reguler Hukum Keluarga A Prodi Hukum Islam Angkatan 2016, terima kasih untuk waktu, semangat, dan kenangan berharga 2 tahun kita. Semoga kita semua menjadi sosok hamba yang sukses di dunia dan di akhirat.
13. Serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidaklah luput dari kekurangan dan kesalahan, seperti kata pepatah tak ada gading yang tak retak begitu juga dalam penulisan tesis ini. Namun, besar harapan penulis agar tesis ini dapat bermanfaat untuk siapa saja yang membutuhkan. Akhir kata yang dapat penulis ucapkan, semoga hangat cinta kasih dan sayang-Nya senantiasa menyertai kita.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 15 Oktober 2018  
Penulis

**Suwandi Soleman,**  
**1620310050**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN DEKAN.....	iv
DEWAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	18
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	26

## BAB II TEORI TENTANG PERAN HAKIM DAN MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TERNATE

A. Pengertian Umum Tentang Hakim.....	28
B. Perceraian Dalam Hukum Islam dan Hukum Di Indonesia.....	38
C. Pengertian Mediasi Menurut Hukum di Indonesia.....	59
D. Tahap dan Proses Mediasi di Pengadilan Agama.....	66
E. Peran dan Fungsi Hakim Mediator.....	110

## BAB III PEMBAHASAN TENTANG SEJARAH PENGADILAN AGAMATERNATE MALUKU UTARA

A. Sejarah Pengadilan Agama Ternate, Maluku Utara.....	120
B. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Ternate, Maluku Utara.....	126

#### **BAB IV ANALISIS TENTANG PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA TERNATE**

A. Peran Hakim dalam Memediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara.....	133
B. Penerapan Perma No 1. Tahun 2016 di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara.....	137
C. Analisis Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara.....	146
D. Upaya Hakim Mediator dalam Mengefektifkan Mediasi sebagai Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara.....	151

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	162
B. Saran.....	164

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Data Mediasi Perceraian tahun 2016 di Pengadilan Agama Ternate

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai khalifah di bumi dalam menjalankan tugasnya memiliki berbagai konflik yang harus dihadapi dan tak dapat dihindari. Perbedaan antar manusia pun berpotensi menjadi penyebab terjadinya konflik baik perbedaan fisik, keyakinan, pola pikir, ataupun kepentingan. Faktor fundamental yang mendasari terjadinya konflik dan menimbulkan persengketaan di antara manusia adalah tidak terpenuhinya kepentingan sebagaimana yang diinginkan. Oleh karena itu, manusia dalam menyelesaikan konflik dapat menggunakan akal dan panduan Al-Qur'an. Dalam menyusun strategi dan prinsip resolusi konflik dan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad dalam berbagai bentuk berupa fasilitasi, negosiasi, adjudikasi, rekonsiliasi, mediasi, arbitrase dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).<sup>1</sup>

Hubungan sosial kemasyarakatan, sengketa pada umumnya terjadi menyangkut hak dan kewajiban yang digolongkan dalam permasalahan perdata. Konflik dapat diselesaikan salah satunya dengan mediasi baik di luar pengadilan (nonlitigasi) ataupun di pengadilan (litigasi). Implementasi mediasi dalam penyelesaian perkara perdata terutama bagi orang yang beragama Islam dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Mediasi bisa dilakukan di awal litigasi maupun selama litigasi terhadap perkara perceraian, gugatan, waris, gugatan harta bersama, gugatan nafkah, hadhanah, dan sebagainya.

---

<sup>1</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke 2 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 120-122

Perkembangan profesi mengimplikasikan kepada tuntutan-tuntutan norma etik yang melandasi persoalan profesional.<sup>2</sup> Namun hal tersebut tidak bisa sempurna karena sifat profesi yang terbatas, khusus dan unggul, maka bukan tidak mungkin akan terjadi gejala-gejala penyalahgunaan terhadap profesi yang dimiliki, yang seharusnya dengan penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum dapat diemban untuk menyelenggarakan dan menegakkan keadilan di masyarakat.

Konflik antar individu yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang terkait, memerlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial, penyelesaian itu tentunya harus didasarkan pada rambu-rambu yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini dijalankan oleh institusi yang disebut peradilan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang itu disebut kekuasaan kehakiman, yang dalam prakteknya diemban oleh Hakim.<sup>3</sup> Penyelesaian konflik agar obyektif maka diharapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para Hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun termasuk dari pemerintah. Keputusan para Hakim hanya terkait pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis keputusannya.<sup>4</sup>

Penentuan fakta-fakta yang relevan dan penentuan kaidah hukum yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapi diputuskan

---

<sup>2</sup> Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, (Refika Aditama, 2006) h. 1

<sup>3</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 4

<sup>4</sup> Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum : Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis, Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*, ( Surabaya: Laksbang Justitia, 2015), h. 168

oleh Hakim yang bersangkutan itu sendiri. Dengan demikian, jelas bahwa Hakim atau para Hakim memiliki kekuasaan besar terhadap para pihak atau yustisiabel berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada Hakim tersebut.<sup>5</sup> Dengan demikian berarti pula bahwa para Hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggung jawab itu, sebab keputusan Hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustisiabel atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut.<sup>6</sup>

Bismar Siregar mengemukakan bahwa Undang-Undang secara jelas menegaskan tanggung jawab Hakim bukan kepada negara bukan kepada bangsa, namun pertama-tama kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru kemudian kepada diri sendiri. Kalau inilah tanggung jawab Hakim, akankah Hakim ragu-ragu menguji kalau perlu membatalkan peraturan yang bertentangan dengan Pancasila yang pada sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup> Dalam menjatuhkan sebuah putusan, Hakim harus memperhatikan serta mengusahakan semaksimal mungkin agar jangan sampai putusan tersebut memungkinkan timbulnya perkara baru (sedapat mungkin para pihak dalam perkara tidak mengajukan banding atau upaya hukum lainnya). Selain itu, Hakim dalam setiap perkara yang diajukan kepadanya harus membantu yustisiabelen dengan berusaha melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, sehingga akan

---

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *"Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi"*, *Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*, Universitas Padjadjaran, (Bandung: 1974), h. 17

<sup>6</sup> Bernard Arief Sidharta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*, Jilid V, (Bandung: 1974), h. 110.

<sup>7</sup> Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 88

menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan, yang berakibat semakin berwibawanya lembaga peradilan. Selain itu, salah satu faktor yang paling mendukung tercapainya peningkatan kemajuan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat suatu negara adalah peradilan yang dapat diterima, dalam arti sistem peradilan yang mampu menyelesaikan sengketa secara cepat dan biaya murah.<sup>8</sup> Oleh karenanya gerak perkembangan perekonomian dan kegiatan praktik bisnis, tidak mungkin mencapai hasil yang gemilang dan lancar tanpa dukungan sistem peradilan.

Pada era reformasi sekarang ini yang disertai krisis multidimensi di segala bidang di antaranya dalam bidang hukum, timbul keprihatinan publik akan kritik tajam sehubungan dengan curat marutnya penegakan hukum di Indonesia.

Menurut Nurnaningsih Amriani dalam kutipannya Komar Kantaatmadja, berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia dewasa ini belum memungkinkan para penegak hukum yaitu Hakim karier memiliki kapabilitas menyelesaikan perkara.<sup>9</sup> Akibatnya sistem peradilan semakin tertinggal, lembaga pengadilan dirasakan tidak dapat mengakomodasi persoalan perkara.

Kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidak efisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan

---

<sup>8</sup> Pendapat Adam Smith sebagaimana dikutip dalam Yahya Harahap, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, ( Jakarta: Laporan Penelitian, BPHN, 1996 ), h. 9.

<sup>9</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. I, h. 5.

peninjauan kembali. Di sisi lain, masyarakat para pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitas belaka.<sup>10</sup>

Sebenarnya terhadap pernyataan maupun keluhan tersebut, Mahkamah Agung telah mengambil kebijaksanaan untuk mengantisipasinya dengan menerbitkan PERMA No. 6 Tahun 1992 yang menganjurkan agar penanganan dan penyelesaian perkara diusahakan selesai dalam tempo 6 bulan. Anjuran dalam surat edaran tersebut dirasa perlu sebagai penekanan pelaksanaan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan ( pasal 4 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan Pasal 2 angka 4 UU nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang terakhir adalah PERMA No 2 Tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan diperbaharui lagi dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, dimana Mahkamah Agung memerintahkan agar semua Hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian. Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 melihat pentingnya integrasi mediasi dalam sistem peradilan.

Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu perkara, sebab dengan mendamaikan itu maka tidak akan menimbulkan pihak yang kalah atau pihak yang menang dalam suatu perkara sehingga tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan<sup>11</sup>. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam

---

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. VII, h. 229.

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, ( Jakarta : Kencana, 2008 ), Cet. ke 5, h. 151.

yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan cara perdamaian atau Ishlah, sebagaimana firman Allah Swt Q.S Al-Hujurat ayat 10 :

**انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلمكم ترحمون**

Untuk mencapai sebuah keputusan yang adil dalam sebuah penyelesaian perkara, seorang Hakim harus menggali dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara. Sebab tidaklah mungkin bagi Hakim untuk menetapkan hukum atau keputusan yang tepat kecuali ia mengetahui dengan jelas mengenai kedudukan perkara yang sebenarnya dan tentang hukum syara' yang berkenaan dengannya.<sup>12</sup>

Upaya mendamaikan para pihak adalah tanggung jawab yang diwajibkan oleh hukum kepada para Hakim dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian. Tindakan Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara bertujuan untuk meminimalisir atau menghentikan persengketaan dan mengupayakan perceraian tidak terjadi.<sup>13</sup>

Penjelasan di atas, Hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah Hakim dalam sidang perkara ketika sidang perkara dimulai. Sementara mediator merupakan seorang Hakim yang ditunjuk oleh ketua Hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak diluar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berperkara.

---

<sup>12</sup> H. Muhammad Kurdi, *Kemandirian Hakim Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), Cet.I, h. 77.

<sup>13</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011 ), Cet II, h. 9.



Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang disebut dengan mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>14</sup>

Menurut D.Y Witanto bahwasanya PERMA hendak memberikan pengertian bahwa meskipun mediasi dilaksanakan dalam proses perkara, namun sifat dan substansi penyelesaiannya berada di luar kewenangan Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya.<sup>15</sup>

Persyaratan mediator antara lain kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sifat empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami, kemampuan menjalin hubungan antar personal, disetujui oleh kedua belah pihak, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitras*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001 ), h. 69.

<sup>15</sup> D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi : dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Proedur Mediasi di pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), Cet I, h. 31.

<sup>16</sup> Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, *Peace Skill, Panduan Mediator terampil Membangun Perdamaian*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), h 63-67.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum* sebagaimana dikutip oleh Edi As'Adi bahwa pada dasarnya mediasi secara normatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a) Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
- b) Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- c) Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d) Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- e) Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan guna mengakhiri sengketa.

Ajaran Islam, adanya proses penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian dikenal dengan sebutan *al-sulh*. Islam menganjurkan pihak yang berperkara menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan. *Sulh* memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam penyelesaian perkara, dan tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti.<sup>18</sup> Anjuran Al-Qur'an dan Nabi Muhammad dalam ajaran

---

<sup>17</sup>Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 4.

<sup>18</sup> Lihat Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 ( Kairo: Dar al-Fath, 1990). H 201. Muhammad Khatîb al-Syarbîni menyebutkan *sulh* sebagai suatu akad dimana para pihak

Islam memilih sulh sebagai sarana penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa sulh dapat memuaskan para pihak dan tidak ada pihak yang merasa menang dan kalah dalam penyelesaian sengketa.<sup>19</sup>

Peradilan Agama sebagai wujud peradilan Islam di Indonesia tentunya mengamalkan konsep sulh yang merupakan ajaran Islam. Selain sulh dikenal juga istilah Hakam yang mempunyai pengertian yang sama dengan mediasi. Dalam sistem hukum Islam, Hakam biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan syiqaq.<sup>20</sup>

Hakim di Pengadilan Agama harus selalu berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Dengan itulah mediator memiliki peran penting dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga ditentukan oleh peran yang ditampilkan oleh mediator. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Pada posisi ini, mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif dimana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka, sehingga mediator dapat dianggap sebagai kendaraan bagi para pihak untuk berkomunikasi.<sup>21</sup>

---

bersepakat mengakhiri persengketaan mereka. Lihat Muhammad Khatib al-Syarbini, *Mughni' al-Muhtaaj* juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr), h. 177.

<sup>19</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), Cet I, h. 159-160.

<sup>20</sup> Nailul Sukri, *Kedudukan Mediasi dan Tahkim di Indonesia* (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah, 1992) h. 30

<sup>21</sup> Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi, Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), h. 201.

Latar belakang mengapa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh Hakim melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), didasari atas beberapa alasan, yaitu :<sup>22</sup>

1. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara.
2. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi.
3. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan.
4. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa.
5. Trend penyelesaian hukum di berbagai negara di dunia.

Menjadi tolak ukur dari sebuah keberhasilan mediasi itu adalah berkurangnya jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama. Namun dalam kenyataannya, Hakim mediator dalam memediasi pihak yang berperkara belum serius dalam menjalankan perannya. Hal ini merupakan salah satu penyebab tidak efektifnya mediasi di Pengadilan Agama. Sehingga perceraian masih terus terjadi dan semakin meningkat. Kaitannya dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis beranggapan bahwa penting untuk dijadikan objek penelitian dalam sebuah tesis. Dan Pengadilan Agama Ternate, Maluku Utara penulis pilih

---

<sup>22</sup> Anonymous. *Buku Komentari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Dibuat atas kerjasama MARI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008 h. 7-12

sebagai tempat penelitian karena jumlah perkara perceraian warga Ternate, Maluku Utara masih banyak.

Tulisan ini ingin menganalisa peranan Hakim mediasi di Pengadilan Agama dalam sebuah tesis dengan judul “**Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian ( Studi Kasus Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara )**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka terdapat tiga permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran hakim dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ternate?
2. Bagaimana Upaya hakim mediator dalam mengefektifitasi mediasi sebagai penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Ternate?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ternate ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui efektifitasi mediasi sebagai penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Ternate
- b. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Ternate.

- c. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi pada Pengadilan Agama Ternate.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, memberikan sumbangsih maupun rujukan referensi bagi para peneliti hukum khususnya yang terkait penelitian tentang mediasi.
2. Secara praktis, dari penelitian ini agar dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi mediator yang akan datang atau pihak yang bersengketa, khususnya dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan praktis yang bermanfaat berupa ide dan masukan bagi para praktisi hukum, hakim, akademisi, dan legislator dalam menyusun rancangan peraturan hukum yang efektif mengenai mediasi dalam rangka mewujudkan proses mediasi yang optimal dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilan Agama.

## **D. Telaah Pustaka**

Tesis Khoirul Latifah yang berjudul “Pandangan Mediator Terhadap Standar Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang.” Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian sangat rendah. Penelitian ini berusaha menentukan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan mediasi dalam perkara perceraian. Banyak pihak mengatakan bahwa standar keberhasilan mediasi dengan mencabut perkara, sedangkan dalam PERMA mengenai mediasi tidak menjelaskan hal tersebut secara detail. Di Pengadilan Agama Malang terdapat perbedaan pendapat mengenai tolak ukur keberhasilan mediasi, yaitu

dengan mencabut perkara dan dengan melakukan rujuk atau perceraian dilakukan secara baik-baik dan bertanggung jawab.<sup>23</sup>

Selanjutnya adalah Tesis Ishak Nugroho berjudul “Peran BP4 dalam Membantu Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata di Lembaga Peradilan di Indonesia (Studi Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta)”. Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan satu-satunya lembaga peradilan DIY yang bekerja sama dengan BP4. Dalam penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menganalisis peran BP4 dalam rangka mengoptimalkan mediasi di lembaga peradilan. Hal tersebut dilakukan dengan penandatanganan memorandum (MoU) kesepakatan penyelenggaraan pelaksanaan mediasi antara pengadilan agama Yogyakarta dengan BP4 agar proses dan hasil penyelesaian sengketa menjadi lebih efektif dan maksimal. Peran BP4 menjadi sangat urgen karena dapat mengurangi beban hakim agar lebih fokus pada proses persidangan. Peran BP4 juga telah sesuai dengan teori sulh yang kedudukannya sama dengan hakim. Legalitasnya pun berkorelasi dengan teori sistem hukum yang mencakup struktur, substansi dan budaya hukum.<sup>24</sup>

Tesis karya Nur Faizah berjudul “Integrasi Mediasi dalam system Peradilan Agama (Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya dalam penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan Agama Yogyakarta).” Penelitian ini menjelaskan mengenai

---

<sup>23</sup> Khoirul Latifah, “*Pandangan Mediator Terhadap Standar Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang*,” Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), hal. 87.

<sup>24</sup> Ishak Tri Nugroho, “*Peran BP4 dalam Membantu Proses Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata di Lembaga Peradilan di Indonesia (Studi Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta)*,” Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. hal. 196-197.

kedudukan PERMA No. 1/2008 dan perannya dalam penyelenggaraan mediasi di pengadilan Agama Yogyakarta, diawali dengan pembahasan mengenai urgensi mengenai mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa yang kemudian diintegrasikan dalam lembaga peradilan dalam berbagai peraturan.<sup>25</sup>

Tesis karya Muhammad Faisal yang berjudul: Upaya hakim Pengadilan Agama Jember Menekan Angka Perceraian Melalui Mediasi dan Peluang Keterlibatan Tokoh Pesantren Tahun 2013. Menjelaskan upaya hakim di Pengadilan Agama, Obyek penelitian pengadilan Agama Jember. Peran Mediator desa dalam menyelesaikan sengketa perceraian ditinjau melalui Talcott Parsons dengan teorinya Fungsionalisme Struktural. Perma nomor 1 Tahun 2008 menempatkan mediasi dalam kedudukan penting, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan.<sup>26</sup>

Tesis karya Hustina yang berjudul : Fenomena mediator Kiai dalam Konflik Keluarga Ditinjau dari Teori Patron Klien, obyek peneltian di Pesantren Al Insap Pekalongan dan Pesantren Bustnul Ulum Sumenep, menjelaskan tentang keterlibatan mediator, luar dalam sengketa perceraian. Metode dan strategi yang digunakan mediator kiai dalam menangani konflik keluarga di pesantren Al- Insap pekalongan dan di Pesantre Bustanul Ulum Pamekasan Madura, merupakan

---

<sup>25</sup> Nur Faizah, *Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasinya dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama Yogyakarta),* Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012), hlm, 317-321.

<sup>26</sup> Muhammad Faisal, *Upaya hakim Pengadilan Agama Jember Menekan Angka Perceraian Melalui Mediasi dan Peluang Keterlibatan Tokoh Pesantren Tahun 2013, Tesis,* Pascasarjana, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang 2013



negosiasi pemecahan masalah dengan tidak memihak dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan dan perjanjian.<sup>27</sup>

Tesis karya Ricky Faturachman yang berjudul : Faktor-faktor Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi dalam menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari. Penelitian ini membahas tentang upaya hakim menjadi mediator setelah adanya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama. Serta faktor apa saja yang menjadi penunjang keberhasilan mediasi tersebut.<sup>28</sup>

Tesis karya Fahrurroza yang berjudul “ Penyelesaian Sengketa Pembagian Hak Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Pontianak” dalam sebuah e-jurnal yang mengungkapkan efektifitas proses mediasi, faktor penyebab gagalnya mediasi dan akibat hukum yang timbul karena proses mediasi yang dijalankan mengalami kegagalan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, berangkat dari banyaknya proses mediasi yang mengalami kegagalan dalam lingkungan pengadilan agama Pontianak yang disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga proses mediasi yang dilakukan tidak efektif. Perkara waris yang masuk berjumlah 24 perkara, 10 perkara berhasil dimediasi, dan 14 perkara tidak berproses atau gagal. Faktor penyebab kegagalan tersebut yaitu, para pihak tidak menghadiri proses mediasi, perbedaan prinsip dan tidak ada itikad baik. Akibat

---

<sup>27</sup> Hustina, *Fenomena mediator Kiai dalam Konflik Keluarga Ditinjau dari Teori Patron Klien, obyek penelitian di Pesantren Al Insap Pekalongan dan Pesantren Bustnul Ulum Sumenep*, Tesis, Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016

<sup>28</sup> Ricky Faturachman *Faktor-faktor Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi dalam menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari*. Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016

hukum dari kegagalan ini menimbulkan upaya hukum yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.<sup>29</sup>

Buku karya Al. Wisnu Broto, dalam buku yang berjudul *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia* (dalam beberapa aspek kajian), Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengkaji bagaimana tugas-tugas yang dilakukan oleh hakim dengan adanya suatu kemandirian hakim. Asas kemandirian hakim dalam menangani suatu perkara juga di anut oleh Indonesia, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang dalam penjelasannya disebutkan „Kekuasaan hakim ialah kekuasaan yang merdeka“ artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu maka harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Sebagai pembeda dalam penelitian tesis ini, peneliti melihat realitas dari teori-teori yang diterapkan dari buku ini, terutama peran hakim dalam menekan angkat perceraian.<sup>30</sup>

Soedikno Mertokusumo, dalam buku *Hukum Acara Perdata Indonesia*, kajiannya tentang Hukum acara perdata yakni bagaimana peraturan hukum yang kemudian mengatur cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiel dengan perantaraan hakim. Untuk lebih konkritnya lagi dalam kajian ini membahas tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Buku ini saya jadikan

---

<sup>29</sup> Fahrurreza, “Penyelesaian Sengketa Pembagian Hak Waris Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Pontianak”. E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum UNTAN, Vol 3 (No.3) 2015, <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/9809> [31 Oktober 2015]

<sup>30</sup> Al- Wisnu Broto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 1997

sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.<sup>31</sup>

Disertasi yang berjudul ‚Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan ikrar talak di Indonesia pasca Undang-undang No 1 tahun 1974‘ oleh Makinudin, tahun 2011 IAIN Suanan Ampel Surabaya. Penelitian ini mengkhususkan bagaimana hukum Islam memandang Ikrar talak di Indonesia pasca Undang-undang no 1 Tahun 1974.

Tesis oleh Nursinta Killian, yang berjudul ‚Efektivitas Peran Hakim Mediator dalam Menetapkan Batas Waktu Mediasi pada Pengadilan Agama Sungguminasa (Suatu tinjauan terhadap pasal 13 Ayat 3 PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama)‘. Dalam penelitian ini lebih fokus pada peran hakim mediator saja, terutama dalam menetapkan batas waktu mediasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 13 Ayat 3 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa. Sedangkan dalam penelitian akan saya lakukan tidak hanya terfokus pada hakim mediaor, tetapi hakim secara keseluruhan.<sup>32</sup>

Berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan, dari segi lokasi sudah berbeda dan juga pokok penelitiannya. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Ternate, Maluku Utara. Penelitian ini tidak hanya melihat kinerja mediator pada sengketa perceraian saja, tetapi juga hingga pada sengketa kewarisan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya sertifikat mediator bagi hakim

---

<sup>31</sup> Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia Yogyakarta 1975

<sup>32</sup> Nursinta Killian, yang berjudul ‚Efektivitas Peran Hakim Mediator dalam Menetapkan Batas Waktu Mediasi pada Pengadilan Agama Sungguminasa, Tesis, UIN Alauddin Makassar, Tahun 2015

di Pengadilan Agama Ternate dan menemukan sejauh mana hasil kinerja hakim (mediator) bersertifikat dan non-bersertifikat terhadap tingkat keberhasilan mediasi.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1) Grand Theory**

(*Ishlah*) Grand Theory; Teori Ishlah (mendamaikan) Secara bahasa, akar kata ishlah berasal dari lafazh *صَلَحَ - يَصْلَحُ* yang berarti “baik”, yang mengalami perubahan bentuk. Kata ishlah merupakan bentuk mashdar dari wazan *إِفْعَال* yaitu dari lafazh *أَصْلَحَ - إِصْلَاحًا*, yang berarti memperbaiki, memperbaiki, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian). Kata *صَلَحَ* merupakan lawan kata dari *سَيِّئًا / فَسَادٌ* rusak). Sementara kata *أَصْلَحَ* biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia.<sup>33</sup>

Secara istilah, term ishlah dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, ishlah dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Sementara menurut ulama fikih, kata ishlah diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan terminologi di atas, studi ini memilih menggunakan kata ishlah untuk menjelaskan mediasi di pengadilan agama. Dari kata ishlah ini kemudian

---

<sup>33</sup> 5 4 E. van Donzel, B. Lewis, dkk (ed), *Encyclopedia of Islam*, (Leiden: E.J. Brill, 1990), Jil. IV, h. 141 5 Abu Muhammad Mahmud Ibn Ahmad al-Aynayni, *al-Bidāyah fi Syarh al-hidāyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th), Jil. 6

<sup>34</sup> Abu Muhammad Muhammad bin Ibn Ahmad al-aynayni, *al-Bidaiyah fi syarh al-hidaiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t) Jil. 9

dikembangkan menjadi teori ishlah. Teori Ishlah bersumber dari al-Quran. Ishlah disebut dalam beberapa ayat di dalam al-quran sebagai berikut:

- 1) Ishlah antar sesama muslim yang bertikai dan antara pemberontak (muslim) dan pemerintah (muslim) yang adil; Q.S. al-Hujurat:9-10,
- 2) Ishlah antara suami-isteri yang di ambang perceraian; dengan mengutus al-hakam (juru runding) dari kedua belah pihak; Q.S. al-Nisa:35. dan lain-lain.
- 3) Ishlah memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (al-Nisa 114)
- 4) Ishlah itu baik, terutama ishlah dalam sengketa rumah tangga (an-nisa: 128)

Teori ishlah ini jika diterapkan untuk memahami mediasi di pengadilan agama berbunyi sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang bersengketa di pengadilan agama adalah orang mukmin. Setiap orang mukmin dengan sesama mukmin lainnya adalah bersaudara. Persaudaraan antara orang mu'min merupakan persaudaraan seagama yang memiliki konsekuensi hukum yaitu antara orang mukmin dilarang saling mendhalimi dan membiarkannya didhalimi, perumpaan seorang mu'min dengan mu'min lainnya laksana seperti tubuh tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara (wa kunu 'ibadallahi ikhwana).<sup>35</sup>
- 2) Akibat persaudaraan antara orang mu'min, jika mereka bersengketa di pengadilan agama maka mereka harus mencari penyelesaian sengketa tersebut dengan ishlah karena ishlah merupakan perintah al-Quran yang ditujukan bagi orang yang beriman (fa ashlihu baina akhawaikum);.
- 3) Pasangan suami isteri yang bersengketa di pengadilan agama adalah orang mu'min. Jika mereka mengangkat seorang hakam untuk mengishlahkan mereka di dalam

---

<sup>35</sup> Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Adhim* (Beirut: dar El-Fikr, 1999), Juz II, hlm 296-297

menghadapi kemelut dalam rumah tangganya Allah akan memberi taufiq kepada suami isteri itu (an-nisa ayat 35)

4) Para pihak yang bersengketa di pengadilan agama dan menyelesaikan sengketa dengan ishlah memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (al-Nisa 114)

5) Jika salah satu pihak yang bersengketa di pengadilan agama berkeinginan untuk melakukan ishlah, maka pihak lain ikut juga berdamai sambil bertawakkal kepada Allah atas apa yang akan dan telah diputuskan dalam perdamaian itu (al-Anfal 61);

## **2. Middle Theory**

Teori sistem hukum Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman digunakan untuk melihat implementasi mediasi. Menurutnya, sistem hukum terdiri atas tiga elemen, yaitu elemen struktur, substansi dan budaya hukum.<sup>36</sup>

Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum seperti Mahkamah Agung, dan badan-badan peradilan di bawahnya termasuk pengadilan agama beserta aparturnya. Hakim pengadilan sebagai struktur pengadilan memiliki peran yang penting di dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Keberhasilan dan kegagalan mediasi ditopang oleh kemampuan dan kecakapan hakim mediator di dalam menjalankan perannya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu elemen substansi hukum. Elemen substansi ini dapat memberikan kepastian kepada para pihak yang bersengketa

---

<sup>36</sup> Lawrence. M. Friedman, *American Law* (New York: W.W Norton and Company. 1984) hlm. 7-12

untuk menemukan jalan keluar dari sengketa yang sedang dihadapi. Peraturan mediasi ini paling tidak berisi mengenai substantif dan prosedural mediasi.

Terkait dengan budaya hukum ini, mediasi di pengadilan agama sesungguhnya merupakan produk dari sistem hukum yang cara pemanfaatan dan penggunaannya sangat tergantung dengan nilai dan keyakinan masyarakat sebagai pengguna mediasi tersebut. Nilai dan keyakinan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat menilai dan berkeyakinan bahwa mediasi dapat berperan 7 Lawrence M. Friedman, *American Law* (New York: W.W. Norton and Company, 1984) hlm. 7-12 8 sebagai sarana penyelesaian masalah sengketa yang dihadapi maka tujuan mediasi akan tercapai sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan biaya ringan, reputasi para pihak tidak terganggu, dan hubungan baik tetap terjaga.

### **3. Operational Theory**

Teori *equitable and legal remedies* Untuk menganalisis mengapa suatu perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi atau tidak, dipilih teori yang dikemukakan oleh Lucy V Kazi.<sup>8</sup> Yaitu keberhasilan proses penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi dikarenakan adanya “*equitable and legal remedies*” yang memberikan adanya kesederajatan yang sama dan penggantian kerugian secara hukum yang harus dihormati oleh para pihak. Para pihak mempunyai keyakinan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi akan mendapat *remedy for damages* bagi mereka dengan *win-win solution* dan bukan *win lose solution*. Di sini, para pihak “sama-sama menang” tidak saja dalam arti

ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril dan reputasi (nama baik dan kepercayaan).

Teori fungsional yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *functional theory*, bahasa belandanya, yaitu *functionele theorie*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *funktionale theorie* merupakan salah satu teori yang mengkaji dan menganalisis persoalan-persoalan yang timbul dalam kemasyarakatan, yang berkaitan dengan fungsinya atau kemanfaatan atau kegunaannya. Secara gramatikal, fungsi disamakan dengan kegunaan sesuatu hal, sedangkan fungsional sendiri dilihat dari aspek fungsinya. Pengertian tentang fungsi dapat dikaji dan dianalisis dari pendapat yang dikemukakan oleh Talcott Parsons dan Robert Merton.<sup>37</sup>

Ada dua unsur yang tercantum dalam pengertian fungsi yang disajikan oleh Talkot Parsons, yaitu:

1. Adanya kumpulan kegiatan
2. Adanya tujuan

Kumpulan kegiatan merupakan kesatuan aktivitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tujuan kumpulan kegiatan itu, adalah untuk memenuhi kebutuhan sistem.

Oleh karena itu, teori fungsional didefenisikan sebagai berikut:

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan berfungsinya norma-norma hukum atau kebiasaan atau institusi yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

---

<sup>37</sup> Zamaksyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqh*, h. 68



Fokus tentang teori ini adalah tentang fungsi atau kegunaan atau kemanfaatan. Berfungsinya lembaga-lembaga atau norma-norma hukum atau kebiasaan itu dapat dilihat, apakah hal itu telah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Apabila kita menganalisis teori ini, maka hukum dilihat dari aspek fungsi atau kegunaan. Para yuris, hakim, pembentuk Undang-Undang dalam menjalankan perannya masing-masing harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak.

Selanjutnya teori yang dipakai adalah Teori efektivitas hukum, maka kita ingin melihat sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus mengukur, sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Seseorang menaati hukum juga tergantung pada kepentingannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap terhadap hukum secara umum sebagaimana yang diakui C. G. Howard dan R.S. Mumners dalam *Law: Its Nature and Limits*, 1965: 46-47, antara lain:

1. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk Undang-Undang, maka pembuat Undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan Undang-undnag tersebut.
2. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum juga tergantung pada optimal atau profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap

pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakup tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi, konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.

#### 4. Teori Tahkim

Secara *Etimologi* tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit yang dua orang yang berselisih atau lebih guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut dengan hakam. Dalam hukum Islam terminology tahkim diartikan sebagai berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima keputusannya untuk menyelesaikan persengketaan mereka.<sup>38</sup>

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Ternate.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*. Metode penelitian deskriptif ini dipilih karena dapat menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan.

---

<sup>38</sup> Zamaksyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqh*, h. 69

## G. Jenis dan Sumber Data

### a Data Primer<sup>39</sup>

Penyusun dalam memperoleh data dan informasi terkait permasalahan melalui observasi, dokumentasi ataupun wawancara yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis atau sosiologi hukum terkait peraturan-peraturan yang berlaku mengenai mediasi.

### b Data Sekunder<sup>40</sup>

Cara lainnya yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yaitu dengan menggunakan dokumentasi berbagai literatur yang mendukung perluasan wawasan atau sudut pandang penyusun, peraturan perundang-undangan dan variabel lain yang berkaitan dengan proses mediasi di Pengadilan Agama.

## H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologi hukum*<sup>41</sup> untuk mengetahui hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum dan pengaruhnya terhadap perilaku sosial yang berpedoman pada aturan-aturan dalam hukum positif yang berkaitan dengan mediasi perceraian di Pengadilan Agama. Dengan berlakunya aturan hukum mediasi di Pengadilan, maka dapat menimbulkan dampak terhadap perilaku masyarakat terhadap

---

<sup>39</sup> Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Leny Wulandari (ed.), cet. Ke-5 (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 106.

<sup>40</sup> Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Ibid

<sup>41</sup> Sosiologi Hukum “*Pound refers to this study as ‘sociology proper’ based on a concept of law as one of the means of social control. Lloyd write of it as essentially a descriptive science employing empirical techniques. Its concerned with an examination of why the law sets about its task in the way it does. Its views law as the product of a social system and as a means of controlling and changing that system.*” Ahmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Hal. 5-6.

substansinya. Pendekatan ini juga mengkaji fakta hukum dilapangan berupa fenomena sosial, kesesuaian fakta, yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan analisis data untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum di masyarakat dalam ruang lingkup Pengadilan Agama.

### **I. Teknik Pengolahan Data**

Dalam hal pengolahan data, penyusun menggunakan teknik analisis data secara kualitatif<sup>42</sup> terhadap data primer dan data sekunder.

- a. Dokumentasi, mempelajari dokumen yang berkaitan dengan mediasi.
- b. Wawancara, dengan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Ternate sebagai Mediator

### **J. Sistematika Pembahasan**

Berhubungan dengan penelitian ini adalah berbentuk proposal tesis di mana akan dilanjutkan pada jenjang tesis, maka terdapat sistematika pembahasan, yaitu:

Bab Pertama. pendahuluan tersebut berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Pendahuluan diletakkan di Bab Pertama, karena merupakan langkah awal dalam penelitian sehingga, yang akan dilakukan dapat memenuhi kaedah-kaedah ilmiah yang benar dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki atau diharapkan.

Bab Kedua, Tinjauan Umum tentang Hakim, Dasar Hukum Mediasi, Perceraian dalam hukum Islam dan hukum di Indonesia. Pada bab ini terdapat sub

---

<sup>42</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, cet. III (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hal. 237.

bab yang akan membahas pengertian umum tentang hakim, Pengertian mediasi menurut Hukum Islam dan Hukum di Indonesia, dasar hukum mediasi, tahapan dan proses mediasi di Pengadilan Agama, peran dan fungsi hakim mediator.

Bab Ketiga Pembahasan tentang sejarah Pengadilan Agama Ternate, Maluku Utara, Proses mediasi di Pengadilan Agama Ternate, Maluku Utara.

Bab Keempat Hasil penelitian. Pada bab ini terdapat sub bab yang akan membahas tentang Peran Hakim dalam memediasi Perkara Perceraian, Penerapan Perma No I Tahun 2016 di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara, analisa efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Ternate, upaya Hakim mediator dalam mengefektifkan mediasi sebagai penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Ternate.

Bab Kelima Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bagaimana peran hakim dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ternate, dapat disimpulkan bahwa Hakim di Pengadilan Agama Ternate selalu memberikan solusi dan pengarahan yang baik kepada para pihak yang berperkara agar bisa rukun dalam membina rumah tangga. Namun dari semua peran dan upaya Hakim untuk mencapai hasil yang baik dari proses mediasi itu belum maksimal karena dari banyaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Ternate, hanya terdapat beberapa kasus saja yang berhasil dimediasi. Hal ini juga tidak terlepas dari kesadaran masing-masing pihak akan pentingnya mediasi itu sendiri terhadap rumah tangganya. Kembali kepada Middle teory bahwa hakim pengadilan sebagai struktur pengadilan memiliki peran yang penting di dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Keberhasilan dan kegagalan mediasi ditopang oleh kemampuan dan kecakapan hakim mediator di dalam menjalankan perannya.
2. Bagaimana Upaya hakim mediator dalam mengefektifitasi mediasi sebagai penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Ternate, dapat disimpulkan bahwa efektifitas mediasi terhadap perkara perceraian, di Pengadilan Agama Ternate, masih belum efektif dikarenakan berbagai macam hal. Pertama adalah tingkat kesadaran pihak berperkara yang rendah dikarenakan perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk berusaha menyelesaikan perkara dengan jalan damai, adalah factor utama yang menjadi

penyebab belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Ternate. Hal ini dapat dibuktikan dari sedikitnya perkara yang dapat dimaikan dengan mediasi, tidak lebih dari sepuluh persen dari jumlah total perkara perceraian per tahunnya mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Kedua peran hakim yang ditetapkan sebagai mediator kurang dapat dimaksimalkan. Dualisme fungsi mediator yang juga berperan sebagai hakim memberikan dampak negatif bagi mediasi yang dilakukannya. Selanjutnya mengenai efektifitas mediasi ini operational theory ini yaitu tentang efektifitas hukum maka kita ingin melihat sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus mengukur, sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ternate adalah.

- 1). Kemampuan Mediator

Mediator memiliki peranan penting dalam menjaga kelancaran sebuah proses mediasi. Oleh karena itu mediator yang menguasai tehnik-tehnik dalam mengelola konflik dan berkomunikasi dengan baik terhadap para pihak yang berperkara akan menjadi pendukung dalam mengupayakan adanya titik temu antara para pihak dan mendorong mudahnya terjadi perdamaian di antara mereka yang berperkara.

- 2). Adanya Niat Untuk Damai

Adanya niat atau keinginan dari para pihak yang bersengketa untuk membuat kesepakatan perdamaian dan tidak jadi melakukan perceraian dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan mediasi.

3).Kemauan para pihak untuk menghadiri proses mediasi akan mendukung lancarnya proses mediasi

b. Faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi adalah :

1). Adanya keterlibatan atau campur tangan dari pihak ketiga dari masing-masing pihak yang berperkara juga dapat menghambat upaya perdamaian yang dilakukan di Pengadilan Agama Ternate oleh Hakim mediator. Seperti keterlibatan keluarga dari kedua belah pihak yang memang juga mengharapkan pasangan tersebut untuk bercerai sebab sudah tidak ada kecocokan lagi di antara mereka.

2). Keterbatasan waktu juga dalam menjalankan proses mediasi sangat minimal, dan banyaknya perkara yang harus ditangani oleh para Hakim sehingga hasil maksimal dalam melakukan perdamaian antara pihak yang berperkara tidak mudah dicapai.

3). Ketidakhadirannya kedua belah pihak yang berperkara dalam proses mediasi. Karena jika salah satu pihak yang berperkara tidak hadir maka secara otomatis sidang mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Poin ini sangat mempengaruhi efektivitas upaya Hakim mediator agar merubah keinginan para pihak yang ingin bercerai.

## **B. Saran.**

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin



menikah. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental yang baik, sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidakpastian saat mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.

2. Kepada Mahkamah Agung, agar segera mengeluarkan PERMA tentang kriteria keberhasilan Hakim dan insentif bagi Hakim yang menjalankan fungsi mediator yang telah diamanatkan dalam Pasal 16 Ayat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; menyelenggarakan pelatihan mediasi kepada hakim yang ditetapkan sebagai mediator yang belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung secara lebih meluas, dan membangun ruang mediasi dan fasilitas yang lebih baik demi menunjang pelaksanaan mediasi di pengadilan agama.
3. Harus adanya sosialisasi tentang pentingnya mediasi yang berlaku di Pengadilan Agama dalam sebuah perkara perceraian sehingga para pihak yang berperkara bisa lebih dewasa memahami makna hidup damai.
4. Kepada Mahkamah Agung disarankan agar membuat suatu aturan mengenai sanksi-sanksi yang diberikan kepada pihak yang menghalangi proses mediasi dalam rangka mengoptimalkan keberhasilan mediasi, bila perlu Mahkamah Agung membuat aturan yang tidak menggampangkan proses perceraian itu sendiri sehingga orang-orang tidak mudah untuk bercerai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet, ke 2 (Jakarta: Kencana, 2011),
- Al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani Abu Daud Sulaiman bin, *Ensiklopedia Hadits 5*, terj. Muhammad Ghazali dkk, (Jakarta : Almahira, 2013),
- Albantany Nur'aisyah, *Plus Minus Perceraian Wanita Dalam Kacamata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta : Sealova Media, 2014),
- Al-Syarbini Muhammad Khatib, *Mughni al-Muhtaj Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), h. 177. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh al-SunnahJuz 2* (Kairo: Dar al-Fath, 1990), h.201dan Wahbah Zuhaili, *al- Fiqh al-Islami wa AdillatuhJuz 6* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t),
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009),
- Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011),
- Anonimous. *Buku Komentari Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan*. Dibuat atas kerjasama MARI, Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Indonesia Institute for Conflict Transformation (IICT), 2008
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, cet. III (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014),

Arimbi, Haroepoetri, dan santosa, *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan* (Jakarta: Walhi, 2003),

As' Adi Edi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),

Asmawi Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta : Darussalam, 2004),

Broto Al. Wisnu, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia* (dalam beberapa aspek kajian), Penerbitan Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1997,

Citro Sudibyo, R. Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ( Jakarta: PT Pradnya Paramitra, 2005),

Emerson Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitras*, ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001 ),

Faizah Nur, *Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama (Analisis terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasinya dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama Yogyakarta),*”

Frazer Evans Ronal S. Kraybill, Alice dan Evans, Robert A. *Peace Skill, Panduan Mediator terampil Membangun Perdamaian*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006),

Goodpaster, Gary *Negosiasi dan Mediasi, Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*, ( Jakarta: ELIPS Project, 1993),

- Ghazali Al, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, ( Bandung : Kharisma, 1994),
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata:Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*,( Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
- H. Kurdi Muhammad, *Kemandirian Hakim Perspektif Hukum Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012),
- Ibrahim Hosein, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Talaq*, (Jakarta : Tintamas, 1961),
- Kusumaatmadja Mochtar, “*Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi*”, *Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*,Universitas Padjadjaran, ( Bandung: 1974),
- Latifah Khoirul, “*Pandangan Mediator Terhadap Standar Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Malang,*” *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016),
- Lubis Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, ( Jakarta : Kencana, 2008 ),
- Musa bin adl Dlahhak,Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin *Ensiklopedia* 9, terj. Saifuddin, ( Jakarta : Almahira, 2013),
- Nimer Mohammed Abu, *Nonviolence and Peace Building in Islam; Theory and Practice*, (Florida: University Press of Florida, 2003),

Noeh Zaini Ahmad, *Perceraian Orang Jawa, Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan Orang Islam Jawa*, (yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991),

Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011),

Prakoso Abintoro, *Etika Profesi Hukum : Telaah Historis, Filosofis dan Teoritis, Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim*, ( Surabaya: Laksbang Justitia, 2015),

Rahman Abdul Do'i, , *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996),

Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2011 ),

Saebani Beni Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Isalam Dan Undang-Undang*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007),

Saifullah, Muhammad *Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia dalam Mukhsin Jamil (Ed), Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang : Walisongo Mediation Centre, 2007),

Sidharta Arief Bernard, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*, Jilid V, (Bandung: 1974),

Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum , Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, (Refika Aditama, 2006)

Smith Adam sebagaimana dikutip dalam Yahya Harahap, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, ( Jakarta: Laporan Penelitian, BPHN, 1996 ),

Siregar Bismar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, ( Jakarta: Rajawali, 1983),

Sohari Sahrani Tihami dan, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Lengkap*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009),

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 1980),

Sukanto, Sosiologi: *Suatu Pengantar* (Jakarta: 1984), h. 237. Lihat Juga Suharto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet, IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2002),

Sukri Nailul, *Kedudukan Mediasi dan Tahkim di Indonesia* (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Syarif Hidayatullah, 1992)

Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, dikutip oleh K. Wantjik, dalam *Hukum Perdata dalam Praktek*,

Surkalam Luthfi, *Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional Kita*, ( Jakarta : CV Pamulang, 2005),

Suwarno, *Psikologi Sosial: individu dan teori-teori psikologi sosial* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),

Taufik H, *Asas-Asas Hukum Acara Perdata Islam*, Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Acara Perdata Dalam Prospek Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta, 1997),

Tesis, Pascasarjana UIN Sunan K Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan

dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.  
Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Leny Wulandari (ed.), cet. Ke-  
5 (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hal. 106. alijaga Yogyakarta (2012),

Tri Nugroho Ishak, “Peran BP4 dalam Membantu Proses Mediasi Penyelesaian  
Sengketa Perdata di Lembaga Peradilan di Indonesia (Studi  
Optimalisasi Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta),” *Tesis*, Fakultas  
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Usman Rachmadi, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Prakti*, (Jakarta: Sinar  
Grafika, 2012),

Uwaidah Kamil Muhamad, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2008),  
hml.. 456

Soemiyati, SH, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang  
Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004),

Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara  
Perdata*, (Jakarta: PT Bineka Cipta, 1993),

Witanto D.Y, *Hukum Acara Mediasi : dalam Perkara Perdata di Lingkungan  
Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun  
2008 Tentang Proedur Mediasi di pengadilan*, (Bandung:Alfabeta,  
2010),

Yazid al-Qazwini Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin, *Ensiklopedia  
Hadits 8*, terj. Saifuddin Zuhri ( Jakarta : Almahira 2013 ),

## **CURRICULUM VITAE**

### **A. DATA PRIBADI**

1. Nama : Suwandi Soleman
2. Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 02 Juni 1992
3. Alamat Asal : Kel Tubo RT 004 RW 006 Kec. Kota Ternate Utara, Prov. Maluku Utara
4. Domisili Sementara : Jln. Jetisharjo, No 418, RT 27, RW 06 Kota Yogyakarta
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Agama : Islam
7. Judul Tesis : Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara)
8. Alamat e-mail : SuwandySoleman92@gmail.com
9. Nomor HP : 081254482459
10. Orang Tua :  
Ayah : Soleman Ibrahim  
Ibu : Hajar Ishak

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. (2003) LULUS SDN 56 Kelurahan Tubo Kota Ternate.
2. (2006) LULUS MTsN Ternate.
3. (2009) LULUS SMA Negeri 4 Kota Ternate.
4. (2014) LULUS Strata satu (S1) Jurusan Ushuluddin. Institut Agama Islam Negeri Ternate
5. (2018) LULUS Strata dua (S2) Konsentrasi Hukum Keluarga Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



no urut	nomor dan tanggal perkara	identitas para pihak	tanggal	mediator	tanggal	hasil mediasi
			penunjukkan	a. Nama	mediasi	
			mediator	b. Profesi		
				c. Nomor sertifikat		
				d. Tanggal sertifikat		
1	0005/pdt- 6/2016/PA- TTE	Sumiyati Binti M.Saleh	18/01/2016	a. Drs. H Munawar	18/01/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Sarbin bin Ode dari		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
2	0004/pdt- g/2016/PA- TTE	Hi. Din Nur S.Pd Bin Nur Umar	18/01/2016	a. Drs. H. Marsono, MH	18/01/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Ilda Neli, S.Pd Binti Bachtiar		c. -		
		Hi. Abdul Majid (Termohon)		d. -		
3	0012/pdt-	Nurlaila Binti	19/01/2016	a. Drs. H. Patte, SH.	19/01/2016	tidak berhasil

	g/2016/PA-TTE	Hasan Basri Aba		MH		
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Jurait Bin Dinda Taba		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
4	0021/pdt-g/2016/PA-TTE	Burhan TuruY Bin Idhar TuruY	21/01/2016	a. Abubakar Gaite, S.Ag,MH	21/01/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Juliyana Binti Ulama Ibrahim		c. 54/BLd/MA-RI/2013		
		(Termohon)		d. -		
5	0013/pdt-g/2016/ PA-TTE	Inriyani Wahab, SE Binti Askar Wahab	20/01/2016	a. Abubakar Gaite, S.Ag,MH	20/01/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Muhammad Saleh, SE Bin Ibrahim Saleh		c. 54/BLd/MA-RI/2013		
		(Tergugat)		d. -		
6	0028/pdt-g/2016/PA-	Mudafir Bin Wahab Buba	21/01/2016	a. Abubakar Gaite, S.Ag,MH	28/01/2016	Tidak berhasil

	TTE					
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Lili Ahadi Binti Ahadi Umar		c.54/BLd/MA-RI/2013		
		(Termohon)		d. -		
7	0045/pdt-g/2016/PA-TTE	Nurhasni Binti Abdullah Ahad,SP	25/01/2016	a. Drs. H. Munawir	25/01/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Ramadhan Junarmando Bin Dorie S Lewenussa,S Pd		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
8	0033/pdt-g/2016/PA-TTE	Nurfahni Binti T. Mansur	25/01/2016	a. Drs. H Munawir	25/01/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Muhid Bin Yamin		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
9	0031/pdt-g/2016/PA-TTE	Febri Permata Syarif	26/01/2016	a. Drs. H. Patte, SH.MH	26/01/2015	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		

		Sitna Yanti Tuhulele		c. -		
		(Termohon)		d. -		
10	0049/ptd-g/2016/PA-TTE	M. Arsad Bin Abdul Hamid Syah	26/01/2016	a. Drs. H. Munawir	26/01/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Nurbani Soleman Binti Abdullah		c. -		
		(Termohon)		d. -		
11	0035/ptd-g/2016/PA-TTE	Suani Lapandi	28/01/2016	a. Abubakar Gaite, S Ag. MH	28/01/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Fauji Mahmud		c.54/Bld/MA-RI/2013		
		(Tergugat)		d. -		
12	0055/ptd-g/2016/PA-TTE	Zakia Arifin Binti Wahid Arifin	28/01/2016	a. Abubakar Gaite, S Ag. MH	28/01/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Bahri Conoras, SHI Bin Alwi Conoras		c.54/Bld/MA-RI/2013		
		(Tergugat)		d. -		

13	60/pdt-g/2015/PA-TTE	Muhammad Sadek Bin Husni Kamaluddin	02/02/2016	a. Drs. Sahrudin Latukau	02/02/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Ida Wahab Binti Wahab Hi. Hamisi		c. -		
		(Termohon)		d. -		

14	0016/pdt-g/2016/PA-TTE	Nurhaedah Binti Daeng Salle	02/02/2016	a. Drs. M Tamam	02/02/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Matalatta m. Tahir Bin. M Tahir		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
15	0055/pdt-g/2016/PA-TTE	Amrin Bin Basiru	04/02/2016	a. Abubakar Gaite, S.Ag,MH	04/02/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Arsina Binti Pyha		c. 54/BLd/MA-RI/2013		
		(Termohon)		d. -		
16	64/pdt-g/2015/PA-	Tasri Baco Bin Baco Daeng	11/02/2016	a. Salahuddin L, MH	11/0/2016	tidak berhasil

	TTE	Baco				
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Noviyanti Mayau Binti Yonas Mayau		c. -		
		(Termohon)		d. -		
17	0051/pdt-g/2016/PA-TTE	Anjasa Esa Bin Esa Gabidar	15/02/2016	a. Drs. H. Munawir	15/02/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Nani Sawa Binti Sawa Ahe		c. -		
		(Termohon)		d. -		
18	0071/pdt-g/2016/PA-TTE	M. Rusli Samsu	16/02/2016	a.Drs. Salahuddin Latokau	16/02/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Hartini Jukri Manase		c. 64/BLd/MA-RI/2009		
		(Termohon)		d. -		
19	0070/pdt-g/2016/PA-TTE	Nurlaila Hanafi Binti Abdul Kadir Hanafi	16/02/2016	a. Drs. H. Munawir	16/02/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Budi Bin Mardjan		c. -		
		(Tergugat)		d. -		

20	0095/pdt-g/2016/PA-TTE	Zulfikar Zainuddin, SE Bin Zainuddin Salle	22/02/2016	a. Drs H. Patte, SH.MH	22/02/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Djohra Amalia Sadik Binti Abd. Muid Sadik		c. -		
		(Termohon)		d. -		
21	0063/pdt-g/2016/PA-TTE	Ratmo Bin Mochtar Botji	23/02/2016	a. Drs M Taman	23/02/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Nikmah Binti H. Adnan H Jakaria		c.		
		(Termohon)		d. -		
22	0090/pdt-g/2016/PA-TTE	Nurjana Ibrahim Binti Ibrahim Jamaluddin	24/02/2016	a. Abubakar Gaite, S.Ag,MH	24/02/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Muhammad Ansar Bin Muliawan		c. 54/BLd/MA-RI/2013		
		(Tergugat)		d. -		
23	0099/pdt-g/2016/PA-TTE	Boki Siti Zulaiha Patra Syah, SP Binti Zamal Kamarullah	29/02/2016	a. Drs. H. Patte, SH. MH	29/02/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Rakib Husen SE. MBA Bin Husen Muhammad H. Syah		c. -		

		(Tergugat)		d. -		
24	0086/pdt-g/2016/PA-TTE	Harianti Damapoli Binti Syamsudin Damapoli	01/03/2016	a. Drs. H. Munawir H. A, SH	01/03/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Harto Passa Bin MUstamin		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
25	99/pdt-g/2015/PA-TTE	Maya Kurniati Binti Mansyur Bakri	07/03/2016	a. Drs. Salahuddin. MH	07/03/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Jainul Andi Atjo Bin Drs. Rusli Andi Atjo		c. 64/Bld/MA-RI/2009		
		(Tergugat)		d. -		
26	107/pdt-g/2016/PA-TTE	Abdul Gafur Bin Taeba	07/03/2016	a. Drs. Salahuddin. MH,MH	07/03/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Rusmala Binti Maslan		c. 64/BLd/MA-RI/2009		
		(Termohon)		d. -		
27	0108/pdt-g/2016/PA-TTE	Sardjan Djafar Bin Sadek Djafar	07/03/2016	a. Drs. M Taman	07/03/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Fatmawati Angar Binti Ansar Soempit		c. -		



		(Termohon)		d. -		
28	0109/pdt-g/2016/PA-TTE	Namira Hi Thalib Binti Hi Thalib Rauf	16/03/2016	a. Drs. Muhtar, Tayib	16/03/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		M.S.A Fauzan Syukur Bin Ibrahim Syukur		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
29	0116/pdt-g/2016/PA-TTE	Harun Bin Hi Masse Malia	16/03/2016	a. Drs. Salahuddin L	16/03/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Retmisary Binti Abd Rahman		c. 64/Bld/MA-RI/2016		
		(Termohon)		d. -		
30	0102/pdt-g/2016/PA-TTE	Muhtar Bin Taha	21/03/2016	a. Drs. Salahuddin	21/03/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Suryani Bin Kmaru		c. 64/Bld/MA-RI/2016		
		(Termohon)		d. -		
31	0126/pdt-g/2016/PA-TTE	Ratna Montolalu Binti Tinjo	21/03/2016	a. Drs. M. Taman	21/03/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		H. Fikhmy Assagaf Bin Umar		c. -		

		(Tergugat)		d. -		
32	0125/pdt-g/2016/PA-TTE	Sury E. Sako Binty Yahanes Sako	21/03/2016	a. Drs. M. Taman	21/03/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Muhammad Amin Hanafi Bin Muhdin Hanafi		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
33	0127/pdt-g/2016/PA-TTE	Sri Rahayu	23/03/2016	a. Drs. H. Awaluddin SH. MH	23/03/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Faisal Senen		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
34	0143/pdt-g/2016/PA-TTE	Irma Muhammad Binti Muhammad	11/04/2016	a. Drs. M Taman	11/04/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		M. Sahril Sangadji Bin Ibrahim		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
35	0120/pdt-g/2016/PA-TTE	Dodik Slamet Pujiono S.S Bin Suto Wijaya	28/03/2016	a. Drs. M. Taman	28/03/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		

		Umi Kalsum S.S Binti H Abd Rajak Syarief		c. -		
		(Termohon)		d. -		
36	0133/pdt-g/2016/PA-TTE	Triyana Binti Babullah Senen	29/03/2016	a. Drs. H. Awaluddin SH. MH	29/03/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Akmal Abas Bin Abas Daud		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
37	0146/pdt-g/2015/PA-TTE	Lili M. Karim binti M. Karim	06/05/2015	a. Drs. H. Patte, SH. MH	06/05/2015	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Mutahir Yakeceb bin Mutalib Y.		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
38	0153/pdt-g/2016/PA-TTE	Darmayu K. Marsaoly Binti Kahar	13/04/2016	a. Drs. Salahuddin L. MH	12/04/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Bahtiar Rais Bin Rais Adam		c. 64/Bld/MA-RI/2009		
		(Tergugat)		d. -		
39	0149/pdt-g/2016/PA-TTE	Sri Wahyuni Hamid Binti Kadir Do Abbas	13/04/2016	a. Abubakar Gaite S.Ag MH	13/04/2016	tidak berhasil

		(Penggugat)		b. Hakim		
		Samsuddin Bin H Abd Manaf		c. 54/Bld/MA-RI/2013		
		(Tergugat)		d. -		
40	0178/pdt-g/2016/PA-TE	M. Taufik Umagapi Bin Buang Umagapi	25/04/2016	a. Drs. H. Taman	25/04/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Lindasari Umagapi Binti Nasaruddin Umagapi		c. -		
		(Termohon)		d. -		
41	0157/pdt-g/2016/PA-TE	Samsudin Abdullah Bin Abdullah	25/04/2016	a. Drs. Awaluddin SH	27/04/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Fatimah Nona Binti Muh. Saleh		c.		
		(Termohon)		d. -		
42	0181/pdt-g/2016/PA-TE	Hapsah	25/04/2016	a. Drs. H.Awaluddin, SH. MH	25/04/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Abdullah H Yaman		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
43	0165/pdt-	Suliyono	23/02/2015	a. Drs. H. Awaluddin SH.	26/04/2016	tidak berhasil

	g/2016/PA-TE			MH		
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Siti Maryam Nurdin Binti Nurdin		c. -		
		(Termohon)		d. -		
44	0155/pdt-g/2016/PA-TE	Abdul Faris Maradjabessy Bin Adam M	09/04/2016	a. Drs. Salahuddin MH	09/04/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Geotifani Soamole Amd, Km Binti Basyir Soamole		c. 64/BLd/MA-RI/2009		
		(Termohon)		d. -		
45	0172/pdt-g/2016/PA-TE	Warni Rasid Binti Djalal Rasid	27/04/2016	a. Drs. H. Munawir H. A, SH	27/04/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Casro Abdul Kadir Bin Abd Kadir		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
46	0114/pdt-g/2016/PA-TE	Hamsin Amir Bini Amir Linga	28/04/2016	a. M. Taman	28/04/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Fahril Jafar Bin Hamsin Amir		c. -		

		(Tergugat)		d. -		
47	0191/ptd- g/2016/PA-TE	Dahrin Jainuddin Bin Jainuddin Yakub	09/05/2016	a. Drs. H Awaluddin SH MH	12/06/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Nurleni Daud Binti Daud Ishak		c. -		
		(Termohon)		d. -		
48	0198/ptd- g/2016/PA-TE	Maya M Monong Binti Munir Monong	18/05/2016	a. Drs H Munawir H SH	01/06/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Sandy M S Awal Bin H Mansyur S Awal		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
49	0214/ptd- g/2016/PA-TE	Nurasia Soleman Binti Nurman Soleman	24/06/2015	a. Drs. Awaluddin, SH MH	24/05/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Ir. Asriadi Ahmad Bin Ahmad		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
50	0212/ptd- g/2016/PA-TE	Nurasia Makapile	24/05/2016	a. Drs. H. Awaluddin SH. MH	24/05/2016	berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		

		Muctar Solisa		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
51	0209/pdt-g/2016/PA-TE	MUhammah Lutfi Nuriadi, ST Bin H Hari Budiono	25/05/2016	a. Abubakar Gaite, S.Ag. MH	25/05/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Anis Mahmudah SP, MSc Binti Muzaini		c. 54/Bld/MA-RI/2013		
		(Termohon)		d. -		
52	0215/pdt-g/2016/PA-TE	Suarsa Binti Tamrin Djohra	26/05/2016	a. Drs. H. Taman	26/05/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Iskandar Yakub bin Yakub Ali		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
53	0195/pdt-g/2016/PA-TE	Yurni Ahmad	30/05/2016	a. Drs. H. Awaluddin SH, MH	30/05/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Ibnu Akmal A Aden		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
54	0231/pdt-g/2016/PA-TE	Putu Tinalawati Binti Abdul Latif	30/05/2016	a. Drs. Awaluddin SH.MH	30/05/2016	tidak berhasil

		(Penggugat)		b. Hakim		
		Hidayat Herde Prayitno Bin Promuji Utomo		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
55	0210/pdt-g/2016/PA-TE	Hairun Salaue	31/05/2016	a. Drs. Salahuddin SH.MH	31/05/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Rosmina Abbas		c. 64/BLd/MA-RI/2009		
		(Termohon)		d. -		
56	0218/pdt-g/2016/PA-TE	Rinto M Adam Bin Machmud Adam	01/06/2016	a. Drs. H.Munawir SH	01/06/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Nuryanti Rasyid Binti Ismail Rasyid		c. -		
		(Termohon)		d. -		
57	0235/pdt-g/2016/PA-TE	Yusmiarti Binti Yusuf Hi Muchtar	07/06/2016	a. Drs. H. Awaluddin SH. MH	07/06/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Dzamil Bin Bosnik Bin Bosnik Hasan		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
58	0223/pdt-	Aznaz Zulfachri	07/06/2016	a. Drs. Salahuddin MH	14/06/2016	tidak berhasil



	g/2016/PA-TE					
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Sulfia Mokolu		c. -		
		(Termohon)		d. -		
59	0239/pdt-g/2016/PA-TE	Bustamin Bin Bachtiar Mojoindo	13/06/2016	a. Drs. M Taman	13/06/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Nafisa Binti Hadji Ibrahim		c. -		
		(Termohon)		d. -		
60	0197/pdt-g/2016/PA-TE	Siti Nuryani SHI Taif Binti Siraju Hi Taif	15/06/2016	a. Abubakar Gaite, S.Ag,MH	15/06/2016	berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Fahdian Yusuf Forinti Bin Yusuf Forinti		c. 54/BLd/MA-RI/2013		
		(Tergugat)		d. -		
61	0225/pdt-g/2016/PA-TE	Waode Endang S Binti Laode Ahmad Hanan	21/06/2016	a. Drs H Awaluddin SH.MH	21/06/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Sukman Bin H Mustafa		c. 54/BLd/MA-RI/2013		
		(Tergugat)		d. -		

62	0242/pdt-g/2016/PA-TE	Aminuddin Abjan Bin Abjan Robo	09/07/2015	a. Abubakar Gaite S Ag MH	09/07/2015	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Johria Binti Kamis Robo		c. 54/Bld/MA-RI/2013		
		(Termohon)		d. -		
63	0244/pdt-g/2016/PA-TE	Amiruddin Abdullah S IP Bin Hi Kader Abdullah	14/06/2016	a. Drs. Salahuddin MH	21/06/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Zuwisah, SH Binti Suud Husen		c. 64/Bld/MA-RI/2009		
		(Termohon)		d. -		
64	0252/pdt-g/2016/PA-TE	Saiful Junaedi Bin Supawi	28/06/2016	a. Drs. H. Awaluddin SH. MH	28/06/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Diaratno Sintawati Binti Jais Goy		c. -		
		(Termohon)		d. -		
65	0259/pdt-g/2016/PA-TE	Sukardi Rajeb Bin Rudin Rajeb	18/07/2016	a. Drs. H Awaluddin SH MH	18/07/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Irma Hamza Binti Hamza Korma		c. -		

		(Termohon)		d. -		
66	0256/pdt-g/2016/PA-TE	Risna Amboday Binti Syarifuddin	18/07/2016	a. Drs. H. Awaluddin SH. MH	18/07/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Ahmad Tewu Bin Hengki		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
67	0269/pdt-g/2016/PA-TE	Marwa Binti Hi Kamaruddin	18/07/2016	a. Drs. M. Taman	18/07/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Ir. Muhammad Syarif Bin Con Bin Hi Hasan M Con		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
68	0267/pdt-g/2016/PA-TE	Dewi Hi Laesa Binti Hi Laesa Johra	19/07/2016	a. Drs. H. Salahuddin SH MH	19/07/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Mursalim Muhammad Bin Muhammad Sangadji		c. 64/Bld/MA-RI/2009		
		(Tergugat)		d. -		
69	0233/pdt-g/2016/PA-TE	Muhammad Ajeb Bin Usman Mustafa	19/07/2016	a. Drs H Awaluddin SH MH	19/07/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		

		Mardianti Ajis Binti Ajis Abdullah		c. -		
		(Termohon)		d. -		
70	0260/pdt-g/2016/PA-TE	Ilda Neli S Pd Binti Bachtiar Hi Abdul Madjid	20/07/2016	a. Abubakar Gaite S.Ag MH	20/07/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Hi Din Nur SPd Bin Umar		c. 54/Bld/MA-RI/2013		
		(Tergugat)		d. -		
71	0251/pdt-g/2016/PA-TE	Sarjan Bahrn	20/07/2016	a. Drs. H. Munawir MH	20/07/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Eluida Tausikal		c. -		
		(Termohon)		d. -		
72	0262/pdt-g/2016/PA-TE	Nurmala Ibrahim Binti Yusuf Ibrahim	25/07/2016	a. Drs. M Taman	25/07/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Surasman Marigolong Bin Sukiman		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
73	0232/pdt-g/2016/PA-TE	Djabal Badar Bin Badar Faraji	01/08/2016	a. Drs. H. Awaluddin SH MH	01/08/2016	tidak berhasil

		(Pemohon)		b. Hakim		
		Hilda A Ali Binti Ade Alyas Muh		c. -		
		(Termohon)		d. -		
74	0292/pdt- g/2016/PA-TE	Muhammad Mahfud Bin Karsilan	02/08/2016	a. Drs Salahuddin MH	02/08/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Rosita Umar Taslim Binti Rusli		c. 64/Bld/MA-RI/2009		
		(Termohon)		d. -		
75	0297/pdt- g/2016/PA-TE	Sri Rahayu	04/08/2016	a. Drs. H Awaluddin SH MH	05/08/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Faisal Senen		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
76	0296/pdt- g/2016/PA-TE	Djubeda Binti Piline	04/08/2016	a. Drs. M Taman	04/08/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Ahmad Lamdala Bin Lamdala		c. -		
		(Tergugat)		d. -		

77	0300/pdt-g/2016/PA-TE	Anjasa Esa Bin Esa Gabidara	08/08/2016	a. Drs M Taman	08/08/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Nani Sawa Binti Sawa Ahe		c. -		
		(Termohon)		d. -		
78	0308/pdt-g/2016/PA-TE	Nova Mustika	15/08/2016	a. Drs. H. M Taman	09/09/2016	Gagal
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Didi Wijaya Ramu		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
79	0287/pdt-g/2016/PA-TE	Naufal Hasan Bin Ali Hasan	11/08/2016	a. Drs H Awaluddin	11/08/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Revita Dewi Binti A Hasan		c. -		
		(Termohon)		d. -		
80	0320/pdt-g/2016/PA-TE	Ansar Bin Abdul Karim Togolobe	18/08/2016	a. Drs. M Taman	18/08/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Mira Ardiana Binti Sulaiman Lainuru		c. -		

		(Termohon)		d. -		
81	0309/pdt-g/2016/PA-TE	Fitri Melinda Binti Muh Syamlan	18/08/2016	a. Drs. M. Taman	18/08/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Ridwan Umar Bin Umar Hadi		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
82	0321/pdt-g/2016/PA-TE	Meindah Sari F A MD Binti Fictor	18/08/2016	a. Drs. H. Awaluddin SH. MH	18/08/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Rahmat Pardin ST Bin Drs Pardin Amin		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
83	0314/pdt-g/2016/PA-TE	Syahrial Bin Hi Ahmad Musa	18/08/2016	a. Drs. H Awaluddin	18/08/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Kiswah Binti Hi Syarif Radjala		c.-		
		(Termohon)		d. -		
84	0318/pdt-g/2016/PA-TE	Santi Sangadji Binti Ramli Sangadji	23/08/2016	a. Drs Salahuddin SH,MH	23/08/2016	tidak berhasil

		(Penggugat)		b. Hakim		
		Irfan Abd Hakam Bin Hamid Abd Hakam		c. 64/BLd/MA-RI/2009		
		(Tergugat)		d. -		
85	0311/pdt-g/2016/PA-TE	Haryati Binti Man Lila	24/08/2016	a. Abubakar Gaite, S.Ag,MH	24/08/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Arifin Bin Besi Rusu		c. 54/BLd/MA-RI/2013		
		(Tergugat)		d. -		
86	0305/pdt-g/2016/PA-TE	Yahya Manila Bin Hasan	24/08/2016	a. Drs. H. Munawir MH	24/08/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Nona Sukur Binti Sukur		c. -		
		(Termohon)		d. -		
87	0322/pdt-g/2016/PA-TE	Yani S Syafi Bin Syahbudin Syafi	25/08/2016	a. Drs. H Awaluddin SH MH	25/08/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Rosmiaty Sangadji Binti H Mansur		c. -		
		(Termohon)		d. -		
88	0313/pdt-g/2016/PA-TE	Elvira Binti IkbAlAbas	29/08/2016	a. Drs. H. Awaluddin SH MH	29/08/2016	berhasil



		(Penggugat)		b. Hakim		
		Fauzul Akbar Bin Ismail Arief		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
89	0317pdt-g/2016/PA-TE	Anita Irwan Nontuju Binti Irwan Nontuju	30/08/2016	a. Drs. Salahuddin MH	30/08/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Sardi A Rajak Bin Aidit Rajak		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
90	0349/pdt-g/2016/PA-TE	Muhtar Husen Bin Momon Husen	05/09/2016	a. Drs. M. Taman	05/09/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Nuryani M Sangadji Binti Mahdar		c. -		
		(Termohon)		d. -		
91	0342/pdt-g/2016/PA-TE	Farhatan Abbas SH Bin Hi Aswadi Abbas	06/09/2016	a. Drs. Salahuddin MH	06/09/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Masyitah Umar SPd Binti Hi Umar Hi Kader		c. 64/Bld/MA-RI/2009		

		(Termohon)		d. -		
92	0351/ptd-g/2016/PA-TE	Dra Mardjorie S Saidah Binti Amal	06/09/2016	a. Drs. Salahuddin SH MH	06/09/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Roni Bin Hans Van Emster		c. 64/BLd/MA-RI/2009		
		(Tergugat)		d. -		
93	0336/ptd-g-2016/PA-TE	Asabul Syarif Bin Syarif Saha	06/09/2016	a. Drs H Salahuddin SH,MH	06/09/2016	tidak berhasil
		(pemohon)		b. Hakim		
		Hasna Hi Murid Binti Hi Kabir Hi Murid		c. 64/BLd/MA-RI/2009		
		(Termohon)		d. -		
94	0335/ptd-g/2016/PA-TE	Hj Neni Binti Hi Tappa	07/09/2016	a. Drs. H. Munawir H. A, SH	07/09/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Muhammad Dahlan Alank Bin Hi Mattang		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
95	0355/ptd-g/2016/PA-TE	Nabila Latukau Binti Ahmad Latukau	08/09/2016	a. Drs. M. Taman	08/09/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		

		Muhammad Ridwan Abubakar Bin Drs Abd Rajak		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
96	0354/pdt-g/2016/PA-TE	Kartini Pandjab Binti Muhammad Pandjab	08/09/2016	a. Drs H AwaluddinMH	08/09/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Rahmat Saleh Mulatjim Bin Basir Mulatjim		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
97	0347/pdt-g/2016/PA-TE	Sri Asria Mandasari Binti Rustam Hi Azis	08/09/2016	a. Drs. M Taman	08/09/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Indra Ifriyandi Bin Rustam Rery		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
98	0344/pdt-g/2016/PA-TE	Sahmir Samad	13/09/2016	a. Drs Salahuddin. MH	13/09/2016	berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Nurleli Ismail		c. -		
		(Termohon)		d. -		
99	0346/pdt-g/2016/PA-TE	Sabirin Bin Suwardi	19/09/2016	a. Drs. H Awaluddin SH MH	19/09/2016	tidak berhasil

		(Pemohon)		b. Hakim		
		Zumini Bint Suwardi		c. 778/Bld/MA-RI/2015		
		(Termohon)		d. -		
100	0376/pdt-g/2016/PA-TE	Mansur Abdullah Tilar Bin Abdullah Tilar	26/09/2016	a. Drs H Awaluddin SH MH	26/09/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Aisah Abdullah Binti Abdullah H Arifin		c. -		
		(Termohon)		d. -		
101	0381/pdt-g/2016/PA-TE	Nurjannah Binti Madung	04/10/2016	a. Drs H Awaluddin SH MH	04/10/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Iskandar Bin Lamida		c. -		
		(Tergugat)		d. -		
102	0380/pdt-g/2016/PA-TE	Suryani Binti Kader SE	27/09/2016	a. Drs. H Salahuddin MH	27/09/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Adnan Bin Sangadji		c. 64/Bld/MA-RI/2009		
		(Tergugat)		d. -		
103	0365/pdt-g/2016/PA-TE	Novita Harun Binti Harun Musa	28/09/2016	a. Drs H Munawir SH	28/09/2016	tidak berhasil

		(Penggugat)		b. Hakim		
		Rilas R Rivai Bin Rasid Soleman		c. -		
		(tergugat)		d. -		
104	0369/pdt-g/2016/PA-TE	Rudi Muhammad Bin Muhammad Salasa	22/09/2016	a. Drs. M Taman	22/09/2016	tidak berhasil
		(Pemohon)		b. Hakim		
		Fahria Mohdar Binti Mohdar Bakar		c. -		
		(Termohon)		d. -		
105	0381/pdt-g/2016/PA-TE	Nurjannah Binti Madung	04/10/2016	a. Drs. H. Awaluddin SH MH	04/10/2016	tidak berhasil
		(Penggugat)		b. Hakim		
		Iskandar Bin Lamida	26/01/2016	c -	26/01/2016	

	(Tergugat)		d	
	Nurbani binti Abdullah			
106.0380/pdt-g/2016/PA-TE	Suryani Binti Kadir	27/09/2016	a. Drs. Salahuddin MH	27/09/2016
	(Penggugat)		b. Hakim	
	Adnan Bin Sangadji		c. 64/BLd/MA-RI/2009	
	(Tergugat)		d. -	
107.0388/pdt-g/2016/PA-TE	Astuti Haruna	19/10/2016	a. Drs Zainal Goroahe MH	19/10/2016
	(Penggugat)		b. Hakim	
	Ruswandi Mahmud		c. -	
	(Tergugat)		d. -	
0367/pdt-g/2016/PA-TE	Faisal Samsudin Bin Samsudin Bago	20/10/2016	a. Drs. H Awaluddin SH MH	20/10/2016
	(Pemohon)		b. Hakim	

	Haziza Marasabessy Binti Marasabessy		c. -	
	(Termohon)		d. -	
0410/pdt-g/2016/PA-TE	Safrudin Batuna	25/10/2016	a. Drs. H Awaluddin	25/10/2016
	(Pemohon)		b. Hakim	
	Sri Wahyuni Adam		c. -	
	(Termohon)		d. -	
0420/pdt-g/2016/PA-TE	Fitria Binti Rustam Gilo	26/10/2016	a. Drs Mursalin Toboku	26/10/2016
	(Penggugat)		b. Hakim	
	Hendra Bin Rudiansyah Bin Suherman		c.	
	(Tergugat)		d. -	
0434/pdt-g/2016/PA-TE	Husen Kapalele Bin Ahmad Kapalele	02/11/2016	a. Drs. M Taman	02/11/2016
	(Pemohon)		b. Hakim	
	Ningsih M Abdul Binti Mahmud		c. -	

	(Termohon)		d. -	
0341/pdt-g/2016/PA-TE	Safyanti Ton	26/10/2016	a. Drs. Zainal Gorahe MH	26/10/2016
	(Penggugat)		b. Hakim	
	Andry Sahbudin		c. -	
	(Tergugat)		d. -	
0416/pdt-g/2016/PA-TE	Nurhasanah Rais Bnti Rais	27/11/2016	a. Drs. Awaluddin SH MH	27/11/2016
	(Penggugat)		b. Hakim	
	Irsan Umasugi Bin H Abd Manaf		c. -	
	(Tergugat)		d. -	